

DETERMINAN JUMLAH PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

Ayank Narita Dyatama¹, Imamudin Yuliadi²

¹Pusat Pengembangan Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

² Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Lingkar Selatan, Bantul, Yogyakarta 55183 Indonesia, Phone: +62-274-387656

E-mail korespondensi: imamudin2006@yahoo.co.id

Naskah diterima: Juni 2014; disetujui: Februari 2015

Abstract: The research aims to analyze the factors influencing the distribution of banking credit, that include the third-party fund, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), and the placing fund in the Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). The data which is used is taken from the financial report of the Conventional Bank and the Shari'a Bank period 2010-2014. The technique analysis used the multiple linear regression model, the hypothesis test with the t-test to determine the variable partially, and f-test to determine all variables at once with the significant of 5 persen. The third party fund has positive influence and significant to the distribution of banking credit Non Performing Loan (NPL) and Return On Assets (ROA) has negative influence and significant to the distribution of credit banking. The placing fund in Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) and Capital Adequacy Ratio (CAR) has negative influence and not significant to the distribution of Shari'a banking financing.

Keywords: financing distribution; third party fund; capital adequacy ratio; return on assets; non performing financing

JEL Classification: G21, G23

Abstrak: Studi ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penyaluran kredit perbankan, yang meliputi Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan penempatan dana di Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Data yang digunakan diperoleh dari laporan keuangan Bank Umum dan Bank Syariah pada tahun 2010-2014. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, uji hipotesis dengan uji-t untuk menguji variabel secara parsial, dan uji-F untuk menguji variabel secara serempak dengan tingkat signifikansi 5 persen. DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan NPL dan ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. Penempatan dana di Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan perbankan syariah.

Kata kunci: penyaluran pembiayaan; dana pihak ketiga; capital adequacy ratio; return on assets; non performing financing

Klasifikasi JEL: G21, G23

PENDAHULUAN

Perekonomian suatu negara dibangun atas dua sektor, yaitu sektor riil dan sektor moneter. Sektor riil adalah sektor ekonomi yang ditum-

pukan pada sektor manufaktur dan jasa. Sedangkan sektor moneter ditumpukan pada sektor perbankan (Nurbaya, 2013).

Keterpurukan perbankan pada saat krisis tersebut tidak berimbas pada perbankan syariah karena selama periode krisis tersebut secara

operasional bank syariah tidak menerapkan sistem bunga tetapi sistem bagi hasil. Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan Bank Muamalat melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sepeser pun bantuan dari pemerintah dan pada krisis keuangan tahun 2008, Bank Muamalat bahkan mampu memperoleh laba Rp300 miliar lebih (Asih, 2012). Perbankan syariah juga mampu bertahan dari terpaan krisis global pada tahun 2008. Perbankan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di bank-bank syariah.

Menurut UU No 21 Tahun 2008 Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perkembangan bank syariah dipandang sangat penting untuk (1) memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syaria'h; (2) meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang belum terserap sistem perbankan yang ada; (3) meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional; dan (4) menyediakan sarana bagi investor internasional untuk melaksanakan pembiayaan dan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syaria'h (Setiartiti, 2004).

Perkembangan bank syariah di Indonesia terbilang cukup pesat dan memuaskan baik dari

segi aset, jumlah bank dan perluasan jaringan kantornya setiap tahunnya. Lahirnya UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah Bank Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) (Qolby, 2013).

Jumlah Bank Syariah masih berjumlah 11 Bank, angka tersebut bertahan selama 4 tahun terakhir dari tahun 2010 sampai 2013. Peningkatan jumlah Bank Syariah yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2009 ke tahun 2010. Pada tahun 2009 jumlah BUS masih 6 unit kemudian naik menjadi 11 unit. Peningkatan jumlah kantor juga sangat berkembang pesat, setiap tahun terjadi peningkatan sekitar 200 jumlah kantor BUS. Pada tahun 2013 jumlah kantor dari bank syariah telah mencapai 1.987 unit. Perkembangan Unit Usaha Syariah mengalami sedikit gejolak tetapi tidak terlalu signifikan. Penurunan hanya terjadi pada tahun 2010 dan 2013. Pada tahun 2010 jumlah UUS turun dari tahun 2009 sebesar 2 UUS disertai dengan menurunnya jumlah kantor UUS dari 287 di tahun 2009 menjadi 262 di tahun 2010, sedangkan pada tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 1 unit kantor dari tahun 2012 tetapi tidak disertai menurunnya jumlah kantor UUS. Pada tahun 2013 jumlah kantor UUS telah mencapai 567 unit.

Menurut Asih (2012), sebagai lembaga intermediasi, tugas pokok bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan atau dana pihak ketiga, kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat mempunyai arti penting baik bagi masyarakat maupun bagi bank syariah itu sendiri. Masyarakat membutuhkan dana segar, perolehan dana tersebut untuk modal usaha. Bagi bank memperoleh pendapatan bagi hasil dan perekonomian secara keseluruhan, akan menggerakkan roda perekonomian. Jumlah

Tabel 1. Perkembangan jaringan kantor perbankan syariah

Indikator	Jaringan Kantor Bank Syariah				
	2009	2010	2011	2012	2013
Bank Syariah					
Jumlah Bank	6	11	11	11	11
Jumlah Kantor	711	1215	1390	1734	1987
Unit Usaha Syariah					
Jumlah bank	25	23	24	24	23
Jumlah Kantor	287	262	312	493	567

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Juni 2014

Tabel 2. Komposisi pembiayaan menurut jenisnya (Miliar)

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
Musyarakah	10.412	14.624	18.960	27.667	39.874
Mudharabah	6.597	8.631	10.229	12.023	13.625
Murabahah	26.321	37.508	56.365	88.004	110.565
Salam	-	-	-	-	-
Istishna'	423	347	326	376	582
Lainnya	3.134	7.071	16.776	19.435	19.476
Total	46.886	68.181	102.655	147.505	184.122

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Juli 2014

pembiayaan yang diberikan oleh suatu bank dapat menunjukkan kemampuan bank tersebut dalam peranannya sebagai perantara keuangan.

Perkembangan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan hal yang positif dari tahun ke tahun. Tingginya pertumbuhan penghimpunan dana telah diimbangi dengan pertumbuhan penyaluran dana kepada sektor riil berupa pembiayaan sehingga fungsi intermediasi perbankan dapat relatif terjaga (Nasihin, 2013). Jumlah pembiayaan yang disalurkan berdasarkan jenisnya terlihat pada tabel 2.

Pada tabel 2 dijelaskan bahwa perkembangan pembiayaan selama 5 tahun terakhir cukup menggembirakan. Pada tahun 2013 total pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah mencapai Rp184.122 miliar. Angka tersebut meningkat sebesar Rp36.617 miliar dari total pembiayaan pada tahun 2012 sebesar Rp147.505 miliar. Peningkatan total pembiayaan yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu mencapai Rp102.655 miliar dari total pembiayaan tahun 2010 sebesar Rp68.181 miliar. Pada tahun 2013 pangsa pembiayaan masih didominasi oleh pembiayaan *murabahah* sebesar 60 persen yaitu sebesar Rp110.565 miliar dari total pembiayaan perbankan syariah. Kemudian disusul oleh pembiayaan *musyarakah* 21,65 per-

sen yaitu sebesar Rp89.374 miliar dari total pembiayaan perbankan syariah. Urutan Ketiga diduduki oleh pembiayaan *mudharabah* 7,39 persen dari total pembiayaan perbankan syariah dan yang terakhir diduduki oleh sebesar lainnya yang berupa pembiayaan *qardh* dan *ijarah* sebesar 10,57 persen dari total pembiayaan perbankan syariah.

Pertumbuhan pembiayaan yang baik dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dana yang bersumber dari masyarakat merupakan sumber dana pokok yang dimiliki oleh bank yang biasanya disebut Dana Pihak Ketiga. Dana tersebut dapat berasal dari simpanan berupa tabungan, giro dan deposito (Sulistya dan Wirakusuma, 2013). DPK ini yang selanjutnya digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran pembiayaan.

Pergerakan DPK menunjukkan pergerakan yang positif dari tahun 2009-2013 seiring dengan meningkatnya jumlah penyaluran pembiayaan. Semakin tinggi jumlah DPK, semakin tinggi pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Pada tahun 2013 total DPK yang berhasil dihimpun oleh perbankan syariah mencapai Rp153.834 miliar. Terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran pembiayaan tersebut dise-

Tabel 3. Perkembangan indikator perbankan syariah di Indonesia

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
DPK (M)	52.271	76.036	115.415	147.512	183.534
FDR (persen)	-	87,60	91,41	120,65	95,87
NPF (persen)	4,01	3,02	2,52	2,26	2,62
CAR (persen)	10,77	16,76	16,63	14,14	14,42
ROA (persen)	1,48	1,59	1,59	1,94	1,58
SBIS (M)	3.076	5.408	9.244	4.993	6.699

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Juli 2014

babkan oleh beberapa alasan. *Pertama*, sifat usaha bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit. *Kedua*, penyaluran pembiayaan memberikan *spread* yang pasti sehingga besarnya pendapatan dapat diperkirakan. *Ketiga*, melihat posisinya dalam pelaksanaan kebijaksanaan moneter, perbankan merupakan sektor usaha yang kegiatannya paling dibatasi dan diatur. *Keempat*, sumber utama dana bank berasal dari dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan (Arisandi, 2009)

Penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah telah menunjukkan kualitas yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari *Financing To Deposit Ratio* (FDR) sudah mencapai titik aman yaitu 85 persen - 110 persen sesuai dengan harapan Bank Indonesia. Rendahnya angka FDR membuktikan bahwa peran intermediasi perbankan syariah belum optimal, sedangkan tingginya angka FDR dapat menimbulkan resiko likuiditas bagi bank. Oleh karena itu Bank Indonesia membatasi titik rendah dan tinggi rasio FDR. Pada tahun 2012, angka FDR telah melewati angka aman yaitu 120,65 persen. Padahal pada tahun 2010, 2011, dan 2013 angka FDR telah mencapai titik aman. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, rasio FDR dihitung dari pembagian pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk antarbank) dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencakup giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk antar bank).

Di dalam dunia perbankan syariah, pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada masyarakat dapat mengandung resiko berupa tidak lancarnya pembayaran yang mampu mempengaruhi kinerja bank yang biasa disebut dengan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Besarnya NPF sudah ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5 persen. Tingginya pembiayaan bermasalah akan menuntut bank untuk menyediakan alokasi dana lain sebagai cadangan menutup kerugian tersebut dan bank akan mengurangi penyaluran pembiayaan berikutnya (Suwarsi, 2008). Pada Bank Syariah tingkat NPF masih menunjukkan batas aman, hanya saja pada tahun 2009 angka NPF mencapai angka 4,01 persen. Pada tahun selanjutnya tingkat NPF hanya

berkisar 2 persen saja. Fenomena tingginya NPL menyebabkan kengganan bank untuk menyalurkan pembiayaan yang disebut *credit crunch*. Bank lebih memilih untuk menyalurkan dananya ke Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) karena dianggap lebih aman.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No 10/11/PBI/2008 yang diperbarui dengan PBI No 12/18/PBI/2010 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah, SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Secara umum, penempatan dana pada SBIS akan mempengaruhi fungsi intermediasi perbankan. Setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah dana yang dialokasikan ke SBIS seiring dengan peningkatan DPK. Pada tahun 2011 terjadi peningkatan dana yang dialokasikan ke SBIS dari tahun 2010, yang awalnya 5.408 miliar menjadi 9.244 miliar. Tetapi pada tahun 2012 terjadi penurunan yang tajam dari tahun 2011 yaitu menjadi 4.993 miliar kemudian meningkat lagi pada tahun 2013 menjadi 6.699 miliar.

Salah satu upaya untuk mengurangi resiko pembiayaan yaitu tingginya NPF adalah dengan permodalan yang cukup. Rasio permodalan sering disebut *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Rasio ini bertujuan untuk melihat bagaimana permodalan bank dapat mendukung kegiatan bank (penyaluran dana) secara efisien dan melihat kemampuan permodalan bank dalam menanggung kerugian akibat tidak lancarnya penyaluran pembiayaan. Oleh karena itu, semakin banyak modal yang dimiliki bank, maka bank akan semakin mampu untuk menambah penyaluran pembiayaannya karena cadangan yang dimiliki ketika bank mengalami kerugian (Suwarsi, 2008). Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8 persen dari aktiva tertimbang menurut resiko yang diprosikan dengan CAR. Perkembangan CAR menunjukkan gerakan yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2010 dan 2011 CAR menunjukkan angka 16,76 dan 16,63 kemudian pada tahun 2012 dan 2013 terjadi penurunan menjadi 14,14 dan 14,42. Hal tersebut dikarenakan jumlah DPK pada tahun 2012 dan 2013 tidak seimbang dengan penya-

luran pembiayaan sehingga bank menggunakan modalnya untuk menutup pembiayaan.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank perlu memperhatikan aspek profitabilitas atau tingkat keuntungan yang dimiliki. Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan dari ebrbagai sumber daya dan dana yang dimilikinya. Profitabilitas biasanya menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA). Salah satu cara untuk memperoleh keuntungan tersebut melalui pendapatan dari penyaluran pembiayaan. Jika pendapatan pembiayaan semakin banyak maka *profit* bank akan bertambah, dan akan mempengaruhi peningkatan penyaluran pembiayaan berikutnya (Suwarsi, 2008). Perkembangan ROA setiap tahunnya mengalami peningkatan yang berarti bank memperoleh laba seiring dengan meningkatnya penyaluran pembiayaan. Pada tahun 2010 dan 2011 ROA Bank Syariah bertahan pada angka 1,59 persen kemudian meningkat pada tahun 2012 dan tahun 2013. Angka tersebut belum memenuhi angka minimal yang disyaratkan Bank Indonesia yaitu sebesar 2 persen. Hal tersebut berarti perbankan syariah belum memenuhi bisa menghasilkan laba minimal bagi sebuah perbankan syariah.

METODE PENELITIAN

Objek dalam studi ini adalah seluruh bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Objek tersebut dipilih karena mempunyai data yang cukup lengkap secara berturut-turut dari Januari 2010 - Juli 2014. Jenis data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder Perbankan Syariah di Indonesia yang meliputi Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA) dan penempatan dana di SBIS, yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah Indonesia dan Statistik Ekonomi Moneter Indonesia periode Januari 2010 - Juli 2014.

Studi ini menggunakan metode sensus di mana keseluruhan Perbankan Syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdapat dalam periode studi

dijadikan sebagai objek studi. Studi ini menggunakan 56 waktu amatan ($N = 56$) (bulan Januari 2010 - Juli 2014). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder berupa yang berupa laporan keuangan tahunan Bank. Data yang dikumpulkan adalah dana pihak ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPL), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Assets* (ROA), penempatan dana SBIS dan volume penyaluran pembiayaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi volume penyaluran pembiayaan Bank Syariah di Indonesia digambarkan dalam fungsi berikut:

$$\text{Volume Pembiayaan} = f(\text{DPK}, \text{CAR}, \text{ROA}, \text{SBIS}, \text{NPF})$$

$$Y = \beta_0 + X_1\text{DPK} + X_2\text{CAR} + X_3\text{ROA} - X_4\text{SBIS} - X_5\text{NPF} + e \quad 1)$$

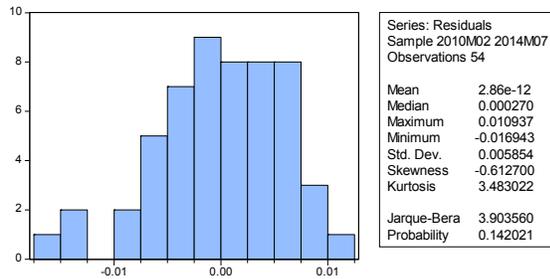
di mana; Y adalah volume penyaluran pembiayaan; β_0 adalah bilangan konstanta; $X_1..X_6$ adalah koefisien Regresi; e adalah kesalahan pengguna yang disebabkan faktor lain; DPK adalah Dana Pihak Ketiga; CAR adalah *Capital Adequacy Ratio*; ROA adalah *Return On Assets*; SBIS adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah, dan NPF adalah *Non Performing Financing*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil studi ini menunjukkan bahwa DPK, ROA, dan NPF masing-masing secara signifikan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan. Sedangkan variabel CAR dan SBIS dalam pengujian tersebut tidak berpengaruh secara signifikan. Model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen penyaluran pembiayaan atau secara bersama-sama variabel independen DPK, CAR, ROA, NPF, dan SBIS berpengaruh terhadap variabel dependen penyaluran pembiayaan.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis non – parametrik Kolmogorof - Smirnov (K-S) (Ghozali, 2009).



Gambar 1. Grafik distribusi normal

Berdasarkan tampilan grafik histogram dapat disimpulkan bahwa variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Cara mendeteksi data berdistribusi normal arau tidak juga bisa dengan melihat nilai probabilitasnya. Jika nilai probabilitas > 5 persen maka data berdistribusi normal, begitu juga apabila nilai probabilitas < 5 persen maka data berdistribusi tidak normal. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai probabilitasnya 0,142021 > 5 persen artinya model regresi tersebut mempunyai distribusi normal.

Tabel 4. Hasil uji linieritas

Ramsey RESET Test			
F-Statistic	16,10794	Prob F (1,45)	0,0002
Log likelihood ratio	16,21691	Prob Chi Square (1)	0,0001

Hasil uji linearitas menjelaskan bahwa nilai prob F stat 0,0002 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model tidak linear.

Berdasarkan Uji multikolonieritas bahwa hasil regresi tidak bebas dari multikolonieritas yang dilihat pada gambar dibawah ini. DPK mempunyai korelasi yang cukup tinggi dengan pembiayaan sebesar 0,99 atau 99 persen. Data yang tidak mengandung korelasi harus dibawa 80 persen. Karena terdapat multikolinieritas maka perlu dilakukan pengobatan. Cara peng-

obatan yang diambil adalah dengan melakukan transformasi akar kuadrat terhadap variabel yang mempunyai korelasi yang cukup tinggi yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK).

Setelah dilakukan transformasi akar kuadrat diperoleh hasil bahwa variabel DPK sudah bebas dari multikolonieritas yaitu ditunjukkan dengan angka -0,151318 atau -15 persen.

Berdasarkan Uji Autokorelasi diperoleh hasil bahwa nilai d sebesar 0,524172 sementara berdasarkan tabel Durbin-Watson diperoleh nilai dl = 1,374 dan nilai du = 1,768. Dengan demikian $0 < d < dl$, sehingga keputusan yang diambil adalah tolak (ada autokorelasi positif). Karena terdapat autokorelasi maka perlu dilakukan pengobatan. Cara pengobatan yang diambil adalah dengan melakukan metode *Cochrane-Orcutt* (C-O). Berdasarkan uji autokorelasi setelah 'pengobatan' diperoleh hasil bahwa nilai d sebesar 1.521730, sementara berdasarkan tabel Durbin-Watson diperoleh nilai dl = 1,374 dan nilai du = 1,768. Dengan demikian $dl < d < 4-du$, sehingga keputusan yang diambil adalah *No Decision* (tidak ada autokorelasi positif).

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2009). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas didalam model regresi antara lain dapat dilakukan dengan Uji Glejser, yakni meregresikan absolut nilai residual sebagai variabel dependen dengan variabel independen. Jika probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5 persen maka tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2009).

Berdasarkan uji heteroskedastisitas diperoleh bahwa data tidak bebas dari heteroskedastisitas yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi < 0,05. Nilai Obs*R-Squared 0,0085 < 0,05, mengindikasikan bahwa data tidak bebas dari heterokedastisitas. Karena terdapat heterokedastisitas maka perlu dilakukan pengobatan. Cara pengobatan yang diambil adalah dengan melakukan transformasi akar kuadrat. Berdasarkan Uji heteroskedastisitas dengan transformasi akar kuadrat diperoleh hasil

bahwa data sudah terbebas dari heteroskedastisitas ditunjukkan dengan nilai $Obs^*R\text{-Squared}$ $0,1441 > 0,05$.

Faktor-faktor yang mempengaruhi volume penyaluran pembiayaan Bank Syariah di Indonesia digambarkan dalam persamaan berikut ini:

$$\begin{aligned} \text{LogPembiayaan} = & -239,4966 + 0,214722 \\ & \text{DLogDPK} - 0,000882 \text{ CAR} - 0,007066 \\ & \text{ROA} - 0,016830 \text{ NPF} - 0,015242 \text{ LogSBIS} \end{aligned}$$

Berdasarkan koefisien regresi dapat disimpulkan bahwa variabel DPK memiliki pengaruh yang paling besar terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah dengan nilai koefisien beta regresi 0,214722, diikuti dengan variabel SBIS sebesar sebesar -0,015242, NPF sebesar -0,016830, ROA sebesar -0,007066 dan CAR sebesar -0,000882,

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Artinya bahwa peningkatan atau penurunan DPK pada periode studi mempengaruhi penyaluran pembiayaan secara signifikan. Semakin tinggi DPK yang berhasil dihimpun oleh perbankan syariah, akan mendorong peningkatan jumlah pembiayaan yang disalurkan, demikian pula sebaliknya.

Penyaluran pembiayaan menjadi prioritas utama bank dalam pengalokasian dananya. Hal ini dikarenakan sumber dana bank berasal dari masyarakat sehingga bank harus menyalurkan

kembali DPK yang berhasil dihimpun kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Hal ini sejalan dengan fungsi bank sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*). Di samping itu pemberian kredit merupakan aktivitas yang paling utama bagi Bank Umum selaku *business entity* untuk menghasilkan keuntungan. Pengalaman dan kemampuan perkreditan yang dimiliki juga turut mendukung keberanian Bank Umum dalam menyalurkan kredit.

DPK merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap penyaluran kredit perbankan. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan fungsi perantara keuangan (*financial intermediary*), DPK merupakan sumber pendanaan yang utama. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 80 persen - 90 persen dari seluruh dana yang dikelola oleh bank (Dendawijaya, 2005).

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan perbankan dan dibutuhkan suatu bank dalam menjalankan operasinya. Bank dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga ini untuk ditempatkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan bagi bank, salah satunya yaitu dalam bentuk pembiayaan. Hampir semua bank mengandalkan penghasilan utamanya dari jumlah penyaluran pembiayaan oleh karena itu pemberian pembiayaan merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan (Dendawijaya, 2005). Hasil studi ini memperkuat hasil studi sebelumnya yang dilakukan oleh Siswati (2013), Nasihin (2013),

Tabel 5. Hasil analisis regresi linier berganda

Variable	Coefficient	Std error	t-Statistic	Prob
C	-239,4966	31600,06	-0,007579	0,9940
DLOGDPK	0,214722	0,082632	2,598516	0,0125
CAR	-0,000882	0,000710	-1,241818	0,2206
ROA	-0,007066	0,003131	-2,256972	0,0288
NPF	-0,016830	0,004512	-3,730469	0,0005
LOGSBIS	-0,015242	0,010915	-1,396446	0,1693
AR(1)	1,000044	0,005670	176,3656	0,0000
R-Squared	0,998642			
Adj R-Squared	0,998465			
F-statistic	5636,659			
Prob (F-Statistic)	0,000000			
D-W stat	1,521730			

dan Iqbal (2013) yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan.

CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan yang artinya hasil dari studi telah menolak hipotesis yang diajukan di mana CAR berpengaruh positif dan signifikan. Hal itu berarti bahwa peningkatan atau penurunan CAR selama periode studi tidak mempengaruhi penyaluran pembiayaan. Semakin tinggi atau turunnya CAR tidak berimbas terhadap naik turunnya penyaluran pembiayaan perbankan syariah. Hasil studi ini berbeda dari hipotesis yang diajukan karena rata-rata CAR Bank Umum pada periode 2009-2014 berada pada kisaran yang cukup tinggi yakni 11,07 persen - 20,23 persen, jauh di atas ketentuan minimal yang disyaratkan oleh Bank Indonesia sebesar 8 persen. Tingginya CAR mengindikasikan adanya sumber daya finansial (modal) yang *idle* ataupun disalurkan ke sektor lain ataupun investasi lain selain pembiayaan, karena seperti diketahui bahwa pembiayaan merupakan investasi yang risikonya paling tinggi. Bank sebagai lembaga komersial jelas tidak mau mengambil resiko terlalu tinggi dalam melakukan aktivitasnya sehingga modal yang tersedia diinvestasikan ke sektor lain ataupun surat berharga. Pulihnya perekonomian dan perbankan secara berangsur-angsur telah mendorong optimalisasi kegunaan sumber daya finansial (modal) melalui penyaluran pembiayaan. Penyaluran pembiayaan bank syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi tidak diikuti dengan perubahan nilai CAR.

Semakin tinggi nilai CAR maka semakin tinggi pula pembiayaan yang disalurkan karena bank mempunyai modal yang lebih untuk menyalurkan uangnya ke pembiayaan. Tetapi kenyataannya CAR tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dibuktikan dengan pada tahun 2010 sendiri terjadi penurunan nilai CAR dari bulan Februari ke Maret di mana angka CAR pada bulan februari 11,43 persen dan jumlah pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp48.479 miliar, sedangkan pada bulan Maret angka CAR turun menjadi 11,07 persen dan jumlah pembiayaan yang disalurkan Rp50.206 miliar. Hal tersebut membuktikan bahwa naik turunnya CAR belum tentu mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan. Di tahun-

tahun berikutnya pun terjadi hal yang serupa.

NPF mempunyai pengaruh negatif dan signifikan yang artinya bahwa peningkatan atau penurunan NPF selama periode studi mempengaruhi penyaluran pembiayaan bank syariah secara signifikan. Semakin tinggi NPF akan mendorong penurunan jumlah kredit yang disalurkan, demikian pula sebaliknya (H3: NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah, Hipotesis diterima). NPF mencerminkan risiko kredit. Semakin tinggi tingkat NPF maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Akibat tingginya NPL perbankan akan lebih berhati-hati (selektif) dalam menyalurkan kredit. Hal ini dikarenakan adanya potensi kredit yang tidak tertagih. Tingginya NPF juga mengakibatkan munculnya pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal besaran modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi kredit. Dengan demikian besarnya NPF menjadi salah satu penghambat tersalurnya pembiayaan perbankan.

Kualitas pembiayaan yang semakin menurun (peningkatan pembiayaan bermasalah) membawa pengaruh negatif terhadap bank selaku pembiayaan. Peningkatan pembiayaan bermasalah ini menimbulkan pembentukan cadangan pembiayaan bermasalah ini menimbulkan pembentukan cadangan pembiayaan bermasalah semakin besar. Cadangan penyisihan pembiayaan ini lawan rekening kerugian pembiayaan. Kerugian pembiayaan merupakan biaya yang berarti menurunkan laba. Penurunan laba bahkan kerugian bank akan berakibat menurunkan modal bank. Penurunan laba bahkan kerugian bank akan berakibat menurunkan modal bank. Dampak yang lebih luas adalah ketika pembiayaan bermasalah tak dapat ditagih lagi berarti terjadi penghentian dana bergulir. Penghentian ini jelas mengganggu pengembangan usaha, menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pengangguran dan menurunkan pendapatan masyarakat (Taswan, 2010).

Dalam kenyataannya perbankan syariah mampu menjaga NPF nya selama lima tahun terakhir. Ketentuan Bank Indonesia adalah bahwa bank harus menjaga NPL di bawah 5

persen. Pada tahun 2009 NPF perbankan syariah sebesar 4,01 persen meskipun cukup tinggi tetapi masih di bawah 5 persen, kemudian disusul tahun 2010 sebesar 3,02 persen, tahun 2011 sebesar 2,52 persen, tahun 2012 sebesar 2,26, tahun 2013 sebesar 2,62 persen. Angka tersebut membuktikan bahwa perbankan syariah menunjukkan kesuksesannya dengan semakin rendahnya angka NPF setiap tahunnya.

ROA berpengaruh negatif dan signifikan yang artinya studi ini menolak hipotesis yang diajukan yaitu bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan. Artinya ROA mengindikasikan bahwa peningkatan atau penurunan ROA selama periode studi mempengaruhi pembiayaan secara signifikan. Semakin tinggi ROA maka semakin turun pembiayaan yang disalurkan.

Hasil studi ini berbeda dengan hipotesis yang diajukan karena rata-rata nilai ROA pada periode studi 2009-2014 berada pada kisaran yang cukup rendah yakni 0,08 persen-2,52 persen jauh di bawah ketentuan minimal yang disyaratkan oleh Bank Indonesia sebesar 2 persen. Tingginya ROA menyebabkan penurunan terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan. Seperti yang diketahui bahwa semakin tinggi nilai ROA maka semakin rendah pembiayaan yang disalurkan. Hal ini bisa dimungkinkan pendapatan yang dihasilkan oleh bank syariah bukan hanya dari pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Pendapatan yang diperoleh disalurkan kepada aset lainnya seperti surat berharga. Menurut Dendawijaya (2005), alasan penggunaan ROA ini Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan menggunakan aset di mana sebagian besar dananya berasal dari masyarakat dan nantinya, oleh bank juga harus disalurkan kembali kepada masyarakat. Tetapi dalam kenyataannya pada tahun 2009 sendiri angka ROA masih di bawah 2 persen sedangkan pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp46.886 miliar, pada tahun 2010 yaitu sebesar 1,67 persen sedangkan pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp68.181 miliar, pada tahun 2011 angka ROA sebesar 1,79 persen dan pembiayaan yang disalurkan Rp102.655

miliar, dan pada tahun 2012 angka ROA mencapai 2,14 persen di atas rata-rata ketentuan Bank Indonesia dan pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp147.505. Meskipun setiap tahun angka ROA meningkat tetapi di setiap bulannya terdapat fluktuasi yang cukup tinggi di mana ketika jumlah pembiayaan meningkat tidak diikuti dengan naiknya angka ROA malahan terkadang angka ROA semakin turun. Hasil studi ini memperkuat studi sebelumnya yang dilakukan oleh Nasihin (2013) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah.

Penempatan dana di SBIS negatif dan tidak signifikan yang berarti hasil ini telah menolak hipotesis yang diajukan yaitu penempatan dana di SBIS negatif dan signifikan. Artinya penempatan dana di SBIS mengindikasikan bahwa peningkatan atau penurunan penempatan dana di SBIS selama periode studi tidak mempengaruhi penyaluran pembiayaan secara signifikan. Semakin tinggi penempatan jumlah dana di SBIS akan mendorong jumlah pembiayaan yang disalurkan dalam tingkat yang tidak signifikan. Keuntungan yang diperoleh dari penempatan dana di SBIS menyebabkan tingginya dana yang disalurkan, hal itu menyebabkan turunnya nilai pembiayaan yang disalurkan, tetapi penurunan pembiayaan berada pada tingkat yang signifikan. Artinya, meskipun penempatan dana menyebabkan penurunan pembiayaan tetapi tidak menjadi masalah terhadap penyalurannya.

Karakteristik SBIS adalah, *Pertama*, SBIS diterbitkan dan ditatausahakan tanpa warkat dan *Kedua*, SBIS tidak dapat diperjualbelikan. Benefit yang diberikan dari SBIS bukan bunga didasarkan atas sistem diskonto, akan tetapi apa yang dinamakan dengan imbalan (Khatimah, 2009). Bank Indonesia menerbitkan SBIS melalui mekanisme lelang. Dalam melakukan pembelian SBIS, BUS dan UUS wajib memenuhi persyaratan FDR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jadi meskipun penyaluran dana ke SBIS mengurangi jumlah pembiayaan yang disalurkan tetapi selama kondisi FDR masih aman dianggap tidak masalah.

Hasil studi ini memperkuat hasil studi sebelumnya yang dilakukan oleh Siswati (2013)

yang menyatakan bahwa penempatan dana di SBIS negatif dan tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah.

SIMPULAN

Variabel DPK berhubungan positif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan dibuktikan dengan nilai koefisien regresi 0,214 dengan nilai signifikansi 0,012 lebih kecil dari 5 persen ($0,012 < 0,05$) sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar DPK maka semakin besar volume pembiayaan yang dapat disalurkan.

Variabel CAR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah pembiayaan dibuktikan dengan nilai koefisien regresi -0,0008 dengan nilai signifikansi 0,226 lebih besar dari 5 persen ($0,226 > 0,05$) tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan bahwa CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan bank syariah. Hal ini disebabkan adanya bank syariah yang belum mampu memaksimalkan dana yang diserap dan banyak aset yang *idle* ataupun disalurkan ke sektor lain ataupun investasi lain selain pembiayaan, karena seperti diketahui bahwa pembiayaan merupakan investasi yang risikonya paling tinggi. Selain naiknya DPK seiring dengan pembiayaan yang menyebabkan bahwa DPK telah mendominasi modal yang digunakan dalam pembiayaan sehingga penggunaan dan CAR bisa disalurkan ke sektor lain selain pembiayaan dan juga biasanya penggunaan CAR dalam hal pembiayaan hanya untuk menutupi NPF yang terjadi. Jadi CAR yang tinggi tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan jika bank syariah tidak mampu memanfaatkan dana yang ada.

Pada studi ini variabel ROA mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar -0,0007 dengan signifikansi = 0,288 lebih kecil dari 0,05 ($0,288 < 0,05$) tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan bahwa ROA mempunyai hubungan yang positif dan signifikan. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat ROA (di bawah ketentuan Bank Indonesia) sehingga tidak ada pengalokasian dana pembiayaan dari ROA sehingga dana yang digunakan untuk melakukan pembiayaan adalah DPK

yang mana DPK merupakan 80 persen - 90 persen sumber dana untuk pembiayaan sehingga wajar jika naiknya pembiayaan tidak disertai dengan ROA. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah pembiayaan semakin rendah tingkat ROA karena dana yang disalurkan dari ROA tidak sepenuhnya disalurkan ke pembiayaan.

Variabel NPF mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar -0,016 dengan signifikansi = 0,0005 lebih kecil dari 0,05 ($0,0005 < 0,05$) sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi NPF maka semakin rendah jumlah pembiayaan yang disalurkan.

Variabel penempatan dana di SBIS mempunyai hubungan yang negatif dan tidak signifikan yang artinya variabel penempatan dana di SBIS tidak mempunyai pengaruh terhadap jumlah pembiayaan dibuktikan dengan nilai koefisien -0,015 dengan signifikansi = 0,1693 lebih besar dari 0,05 ($0,1693 > 0,05$) tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan bahwa penempatan dana di SBIS berpengaruh negatif dan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa penempatan dana di SBIS tidak mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan, karena dalam peraturan Bank Indonesia, bank syariah harus memenuhi tingkat FDR yang ditetapkan sebelum menempatkan dananya di SBIS yaitu nilai FDR berkisar 90 persen -110 persen sehingga tidak mungkin bahwa penempatan dana di SBIS telah menyebabkan pengurangan dana di pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisandi, Desi. (2009). Analisis faktor penawaran kredit pada bank umum di Indonesia. *Jurnal Universitas Gunadarma*.
- Asih, Norma Budi. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *financing to deposit ratio* pada bank umum syariah di Indonesia Periode 2007-2010. *Disertasi*. UIN Sunan Kalijaga.
- Dendawijaya, Lukman. (2005). *Manajemen perbankan*. Edisi 2. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Ghozali, Imam. (2009). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan penerbit UNDIP.
- Iqbal, Mohammad. (2013). Pengaruh dana pihak ketiga, rasio keuangan, jaringan, inflasi dan BI Rate terhadap volume pembiayaan bank umum syariah. *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dipublikasikan.
- Khatimah, Husnul. (2009). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana perbankan syariah di Indonesia sebelum dan sesudah kebijakan akselerasi perbankan syariah tahun 2007/2008. *Jurnal Optimal*, Vol. 3 No. 1 Maret 2009.
- Nasihin. (2013). Pengaruh faktor internal bank terhadap volume pembiayaan pada bank syariah di Indonesia. *Skripsi*. Dipublikasikan. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Nurbaya, Ferial. (2013). Analisis pengaruh CAR, ROA, FDR, dan dana pihak ketiga (dpk) terhadap pembiayaan murabahah periode maret 2001–desember 2009 (studi kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk). *Skripsi*. Dipublikasikan Semarang: Universitas Diponegoro.
- Pratami, W.A Novi. (2011). Analisis pengaruh dana pihak ketiga (DPK), *capital adequacy ratio* (CAR), *non performing financing* (NPF) dan *return on asset* (ROA) terhadap pembiayaan pada perbankan syariah (studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011). *Skripsi*. Dipublikasikan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Setiartiti, Lilies. (2004). Membangun citra perbankan syariah sebuah alternatif strategi bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* Vol. 5 No. 1, April 2004; hlm 45-54. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Siswati. (2013). Analisis penyaluran dana bank syariah. *Jurnal Dinamika Manajemen* Vol 4 No 1.
- Suharyadi dan Purwantoro S.K. (2004). *Statistika untuk ekonomi dan keuangan modern* Jilid 2. Jakarta: Salemba Empat
- Sulistya, Kadek Ari dan Made Gede Wirakusuma. (2013). Pengaruh dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio*, dan suku bunga SBI terhadap penyaluran kredit bank BUMN di Indonesia periode 2006-2010. *Jurnal Akuntansi*, Vol 2. No 2. Bali: Universitas Udayana.
- Suwarsi. (2008). Pengaruh *loan to asset ratio*, *rate of return on loan ratio*, *capital adequacy ratio*, dan *non performing financing* terhadap penyaluran pembiayaan. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Qolby, M. Luthfi. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2007-2013. *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 4, No. 2.
- Taswan. (2010). *Manajemen perbankan konsep, teori dan aplikasi*. Edisi II. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Winarno, Wing Wahyu. (2011). *Analisis ekonometrika dan statistika dengan Eviews*. Edisi 3. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.